



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA WIDIANINGSIH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET
3. NHK : 868382

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.185.260.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m²/137.66 m² di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/108 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 179.330.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/10 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/100 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.930.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m²/100 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 142.219.214**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.530.379.214

III. HUTANG Rp. 1.222.351.225**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 308.027.989



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.